



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

PERIODE 31 DESEMBER 2025

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan KPKNL Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jayapura. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 06 Mei 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Khusnawan Sigit Susanto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	47
Lampiran dan Daftar	48



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA**

Gedung Keuangan Negara Jayapura, JL. A. Yani No.8, Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura
Utara, Kota Jayapura
Telepon : 0967-534641, Email kpknjayapura11@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 06 Mei 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Khusnawan Sigit Susanto



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.919.532.134 atau mencapai 55% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp10.762.610.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.674.930.036 atau mencapai 62.63% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.271.154.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per akhir tahun 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.295.033.536 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp123.200.112; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 6.171.833.424; dan Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.594.760 dan Rp6.266.438.776.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5,859,479,134 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2,498,076,396 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.361.402.738.

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Surplus Pelepasan Aset dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp60.053.000 Rp0, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp3.421.455.738.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp6.018.198.657 ditambah Surplus-LO sebesar Rp3.421.455.738 kemudian dikurang Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.173.215.619, sehingga terdapat Penurunan Ekuitas entitas senilai Rp248.240.119. Dengan demikian, Ekuitas Akhir per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6.266.438.776. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dikurang akun Ditagihkan Dari Entitas Lain. Akun Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan realisasi belanja, sedangkan Akun Ditagihkan Dari Entitas Lain merupakan realisasi pendapatan.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31
DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 2025		% thd Angg	TAHUN ANGGARAN 2024		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	10.762.610.000	5.919.532.134	55,00	4.280.562.000	4.992.160.105	116,62
JUMLAH PENDAPATAN		10.762.610.000	5.919.532.134	55,00	4.280.562.000	4.992.160.105	116,62
BELANJA							
Belanja Operasi	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-	-	
Belanja Barang	B.4	2.601.030.000	2.107.673.035	81,03	2.424.367.000	2.285.610.188	94,28
Belanja Modal	B.5	1.670.124.000	567.257.001	33,96	906.990.000	906.986.000	100,00
Jumlah Belanja Operasi		4.271.154.000	2.674.930.036	62,63	3.331.357.000	3.192.596.188	95,83
JUMLAH BELANJA		4.271.154.000	2.674.930.036	62,63	3.331.357.000	3.192.596.188	95,83

II. NERACA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Lainnya dan Setara Kas	25.400.000	14.966.000
Belanja Dibayar di Muka	25.000.000	12.500.000
Persediaan	72.800.112	72.487.533
Jumlah Aset Lancar	123.200.112	99.953.533
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan TP/TGR	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	2.564.512.000	2.564.512.000
Peralatan dan Mesin	3.726.765.550	3.841.904.123
Gedung dan Bangunan	2.520.226.000	2.520.226.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.000.000	2.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.641.670.126)	(2.987.382.320)
Jumlah Aset Tetap	6.171.833.424	5.941.259.803
ASET LAINNYA		
Aset Lain-Lain	458.598.274	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(458.598.274)	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	6.295.033.536	6.041.213.336
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Muka dari KPPN		
Utang kepada Pihak Ketiga	28.594.760	23.014.679
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	28.594.760	23.014.679
JUMLAH KEWAJIBAN	28.594.760	23.014.679
EKUITAS		
Ekuitas	6.266.438.776	6.018.198.657
JUMLAH EKUITAS	6.266.438.776	6.018.198.657
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.295.033.536	6.041.213.336

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31
DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	5.859.479.134	4.880.525.205
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		5.859.479.134	4.880.525.205
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	65.642.201	97.531.142
Beban Barang dan Jasa	D.4	959.597.429	914.832.839
Beban Pemeliharaan	D.5	243.981.062	254.777.682
Beban Perjalanan Dinas	D.6	821.296.624	1.032.790.764
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	407.559.080	396.671.985
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		2.498.076.396	2.696.604.412
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.361.402.738	2.183.920.793
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset non lancar		60.053.000	111.634.900
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		60.053.000	111.634.900
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		60.053.000	111.634.900
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		3.421.455.738	2.295.555.693
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		3.421.455.738	2.295.555.693

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2024
EKUITAS AWAL	E.1	6.018.198.657	5.522.206.881
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	3.421.455.738	2.295.555.693
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(3.173.215.619)	(1.799.563.917)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	248.240.119	495.991.776
EKUITAS AKHIR	E.7	6.266.438.776	6.018.198.657

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 30 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

Profil

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Lantai 4, Jalan Ahmad Yani No.8, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Rencana Strategis

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPKNL Jayapura berkomitmen dengan visi ***“menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola***

keuangan negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku membawahi 4 (empat) kantor vertikal di daerah, yaitu KPKNL Jayapura, KPKNL Biak, KPKNL Sorong, dan KPKNL Ambon.

*Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 berasal dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
 - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet		Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
		Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - d. Tanah
 - e. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2025 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Nilai Kinerja
Organisasi

A.6. Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai Kinerja Organisasi pada KPKNL Jayapura Tahun 2025 sebesar 110,52. Nilai tersebut diperoleh dari IKU *Stakeholder Perspective* (30%) sebesar 100,65; IKU *Customer perspective* (20%) sebesar 107,56; IKU *Internal Process Perspective* (25%) sebesar

115,56; dan IKU *Learning and Growth Perspective* (25%) sebesar 119,66.

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jayapura meningkat 1,57% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 108,95. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Jayapura mengalami peningkatan capaian kinerja.

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jayapura 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective	
Stakeholder Perspective (30%)											100,65	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan telang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-								100,65		
1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,58%	105,29	105,29	60,62		
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan telang	Max	P/M	100,00%	94,36%	14,00%	42,42%	94,36	94,36	40,03		
Customer Perspective (20%)											107,56	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan telang yang optimal	-								95,13		
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	110,18%	19,00%	36,54%	110,18	110,18	40,26		
2b-CP	Persentase realisasi pokok telang	Max	P/L	100,00%	73,21%	19,00%	36,54%	73,21	73,21	26,75		
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	104,45%	14,00%	26,92%	104,45	104,45	28,12		
3 Pelayanan kekayan negara dan telang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa											115,58	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	96,41	14,00%	50,00%	125,21	120,00	60,00		
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	9365,38%	14,00%	50,00%	126,56	120,00	60,00		
Internal Process Perspective (25%)											115,58	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								111,13		
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	110,49%	14,00%	50,00%	110,49	110,49	55,25		
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	111,77%	14,00%	50,00%	111,77	111,77	55,88		
5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan telang yang profesional dan produktif												118,99
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	191,67%	14,00%	33,33%	191,67	120,00	40,00		
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	113,88%	14,00%	33,33%	162,69	120,00	40,00		
5c-CP	Persentase produktivitas telang	Max	P/M	80,00%	96,17%	14,00%	33,33%	120,21	120,00	40,00		
Learning and Growth Perspective (25%)											119,66	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00		
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00		
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00		
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	98,00%	14,00%	33,33%	122,50	120,00	40,00		
7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif												119,66
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	117,98	14,00%	50,00%	117,98	117,98	58,99		
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	111,25	14,00%	50,00%	139,06	120,00	60,00		
8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif											119,66	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	96,33	14,00%	50,00%	120,41	120,00	60,00		
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WRK/WBBM	Max	P/M	100,00	134,03	14,00%	50,00%	134,03	120,00	60,00		

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran pada DIPA

Uraian	2025	
	ESTIMASI	REALISASI
	PENDAPATAN	PENDAPATAN
Pendapatan		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.100.600.000	2.002.574.553
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	12.789.000	75.522.993
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	8.649.221.000	3.781.361.558
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0
Jumlah Pendapatan	10.762.610.000	5.859.459.104
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.601.030.000	2.107.673.035
Belanja Modal	1.670.124.000	567.257.001
Jumlah Belanja	4.271.154.000	2.674.930.036

*Realisasi
Pendapatan
Rp5.859.459.104*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.859.459.104 atau mencapai 54,44 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.762.610.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura hanya terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.100.600.000	2.002.574.553	95,33%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12.789.000	75.522.993	590,53%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	-	
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	8.649.221.000	3.781.361.558	43,72%
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	
Jumlah	10.762.610.000	5.859.459.104	54,44%

Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi pendapatan paling besar terdapat pada pendapatan bea lelang pegadaian sebesar Rp3.781.361.558. Realisasi pendapatan lainnya berasal dari pendapatan bea lelang pejabat pejabat Lelang kelas I sebesar Rp2.002.574.553, dan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp75.522.993.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp905.445.435*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp905.445.435 atau 21,97 persen dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp4.121.856.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Anggaran Setelah Revisi dan Realisasi Belanja

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.601.030.000	2.107.673.035	81,03%
Belanja Modal	1.670.124.000	567.257.001	33,96%
Total Belanja Kotor	4.271.154.000	2.674.930.036	62,63%
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	4.271.154.000	2.674.930.036	62,63%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Tabel 2.4 Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp2.107.673.035 atau 81,03% dari pagu anggaran sebesar Rp2.601.030.000 dan Belanja Modal sebesar Rp567.257.001 atau 33,96% dari pagu anggaran sebesar Rp1.670.124.000. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya jumlah anggaran yang diblokir pada tahun anggaran 2025. Namun, dalam laporan keuangan anggaran yang diblokir tidak dikecualikan dalam perhitungan realisasi belanja. Sehingga realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 tercatat lebih kecil dibandingkan dengan 2024. Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Perbandingan Belanja				
	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Kenaikan / Penurunan
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang	2.107.673.035	81,03	2.293.279.888	94,28	-13,25
Belanja Modal	567.257.001	33,96	906.986.000	100,00	-66,04
Jumlah	2.674.930.036	62,63	3.200.265.888	95,83	

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sama dengan Tahun Anggaran 2024, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.

*Belanja Barang
Rp849.445.435*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp2.107.673.035 dan Rp2.293.279.888. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya jumlah anggaran yang diblokir pada tahun anggaran 2025. Namun, dalam laporan keuangan anggaran yang diblokir tidak dikecualikan dalam perhitungan realisasi belanja. Sehingga realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 tercatat lebih kecil dibandingkan dengan 2024. Terjadi kenaikan yang cukup besar dari belanja barang operasional seperti belanja keperluan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, dan belanja honor operasional satuan kerja. Untuk seluruh jenis belanja barang yang lain seperti belanja barang non operasional, persediaan, jasa, pemeliharaan, perjalanan dalam negeri mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan besarnya angka yang diblokir sehingga anggaran yang tersedia pada tahun 2025 menjadi lebih kecil. Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	834.260.866	679.697.336	22,74
Belanja Barang Non Operasional	61.580.203	132.164.824	(53,41)
Belanja Barang Persediaan	65.554.280	89.563.700	(26,81)
Belanja Jasa	81.000.000	96.615.882	(16,16)
Belanja Pemeliharaan	243.981.062	254.777.682	(4,24)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	821.296.624	1.040.460.464	(21,06)
Jumlah Belanja	2.107.673.035	2.293.279.888	(8,09)

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp567.257.001*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp567.257.001 dan Rp906.986.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan 37,43% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya blokir keseluruhan anggaran renovasi rumah negara.

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	567.257.001	906.986.000	-37,46%
Jumlah Belanja	567.257.001	906.986.000	-37,46%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0.*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Rekening Virtual Account (650095381291000)	-	-
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ kan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp25.400.000 .*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.400.000 dan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.966.000. Saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan setoran uang jaminan lelang yang menunggu pelunasan dan menunggu jadwal Lelang. Di samping itu, terdapat pelunasan yang dilakukan pada akhir bulan dan tidak dapat disetorkan pada hari yang sama, serta menunggu pelunasan lot lainnya yang memiliki nomor RL yang sama. Kemudian terdapat bea materai yang digunakan pada aplikasi Lelang generasi lelang.go.id, penyetoran dilakukan di tanggal 2 bulan berikutnya.

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	25.400.000	14.966.000
Jumlah	25.400.000	14.966.000

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp25.400.000 .*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.400.000 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.966.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Dalam kondisi tahun anggaran 2025, kas lainnya dan setara keseluruhnya berasal dari kas di bendahara penerimaan Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (KKP)	20.238.400	
Dana Pihak Ketiga	53.887.717	14.966.000
Jumlah	74.126.117	14.966.000

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki piutang PNB. Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Tabel 3.4 Rincian Piutang PNB

Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Bagian Lancar TP/TGR. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Bagian Lancar TPA. Saldo Bagian Lancar TPA per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2025 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja Dibayar di Muka
Rp12.500.000*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.500.000 dan Rp12.500.000. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pihak ketiga disini Adalah pihak pemilik Gudang arsip.

Tabel 3.6 Rincian Belanja Dibayar di Muka

Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Pembayaran Sewa Gudang Arsip	12.500.000	12.500.000
Jumlah	12.500.000	12.500.000

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp0.

C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan

Rp72.800.112

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp72.800.112 dan Rp72.487.533. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Persediaan

Persediaan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Barang Konsumsi	72.800.112	72.487.533
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	72.800.112	72.487.533

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Tagihan TP/TGR. Saldo Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki TPA. Saldo TPA per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tabel 3.9 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.2.564.512.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jayapura per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.564.512.000. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1000m2	Jalan Lembah Sunyi IV, Angkasapura, Jayapura Utara	2.564.512.000
Jumlah			2.564.512.000

Peralatan dan

Mesin

Rp3.726.765.550.

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp3.726.765.550 dan Rp 3.841.904.123. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3.844.380.363
Mutasi tambah:	645.115.561
Mutasi kurang:	753.271.274
Saldo per 31 Desember 2025	3.726.765.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.203.981.018)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	1.522.784.532

Gedung dan

Bangunan

Rp 2.520.226.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 2.520.226.000 dan Rp 2.520.226.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	2.520.226.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	2.520.226.000

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi transaksi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp2.000.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.000.000. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan.

Tabel 3.13 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	2.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	2.000.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.000.000

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0.*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Aset Tak Berwujud C.20 Aset Tak Berwujud

Rp0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp2.641.670.126

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp2.641.670.126 dan Rp2.987.382.320. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	2.564.512.000	-	2.564.512.000
2	Peralatan dan Mesin	3.726.765.550	(2.203.981.018)	1.522.784.532
3	Gedung dan Bangunan	2.520.226.000	(437.689.108)	2.082.536.892
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	2.000.000	-	2.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.813.503.550	(2.641.670.126)	6.171.833.424

Aset Lain-Lain

Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Namun, untuk per tanggal 31 Desember 2025 sudah tidak ada aset lain-lain.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0.*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp28.594.760.*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp28.594.760 dan Rp23.0114.679. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0.*

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum ditagihkan tersebut merupakan transaksi atas UP yang belum diajukan SPM GUP ke KPPN.

*Ekuitas
Rp5.967.032.166.*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.253.938.776 dan Rp6.018.198.657 .

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp5.859.479.134.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.859.479.134 dan Rp 4.880.525.205. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5.859.479.134	4.880.525.205	20,06%
Jumlah	5.859.479.134	4.880.525.205	20,06%

Beban Pegawai
Rp0.

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban
Persediaan

D.3 Beban Persediaan

Rp65.554.280.

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.554.280 dan Rp97.531.142. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester I TA 2025	Semester I TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	65.642.201	97.531.142	-32,70%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	65.642.201	97.531.142	-32,70%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp972.097.429.*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp972.097.429 dan Rp.914.832.839. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	Kenaikan / Penuruna
Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos	63.368.999	60.660.600	4,46%
Belanja Honor Operasional Satker	111.840.000	64.724.000	72,80%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.982.860	0	#DIV/0!
Belanja Bahan	46.497.343	132.134.824	-64,81%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.799.300	13.062.200	-63,26%
Belanja Langganan Telepon	0	1.319.379	-100,00%
Belanja Keperluan Perkantoran	632.052.677	547.601.836	15,42%
Belanja Jasa Profesi	15.300.000	15.300.000	0,00%
Belanja Sewa	65.700.000	80.000.000	-17,88%
Belanja Barang Operasional Lainnya	17.456.250	0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.100.000	0	#DIV/0!
Jumlah	972.097.429	914.802.839	6,26%

Beban

Pemeliharaan

Rp243.981.062.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp243.981.062 dan Rp254.777.682. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 4,24 persen dimana selisih tersebut berasal dari pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	Kenaikan / Penurunan
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47.785.234	40.500.000	17,99%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.195.828	214.277.682	-8,44%
Jumlah	243.981.062	254.777.682	-4,24%

Beban Perjalanan

Dinas

Rp233.484.549.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp821.296.624 dan Rp1.032.790.764. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 20,48% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dan pagu blokir. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	741.664.624	904.686.764	-18,02%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.632.000	128.104.000	-37,84%
Jumlah	821.296.624	1.032.790.764	-20,48%

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp407.559.080.*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp407.559.080 dan Rp396.671.985. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.6 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	353.645.509	342.758.415	3,18%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.913.571	53.913.570	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	407.559.080	396.671.985	2,74%

*Surplus / Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.7 Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran
2025 dan Tahun Anggaran 2024*

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu		
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp6.018.198.657.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.018.198.657 dan Rp5.522.206.881.

Defisit LO

Rp3.408.955.738.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.408.955.738 dan Rp2.295.555.693. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian atas aset berupa persediaan yang disebabkan oleh perubahan harga perolehan persediaan. Penyesuaian Nilai Aset berupa persediaan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap (Revaluasi BMN). Selisih

Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran dan Tahun Anggaran 2024 pada KPKNL Jayapura adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Rp0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Serta koreksi karena adanya Reklasifikasi kode barang pada pencatatan di SIMAK-BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0.

*Transaksi Antar
Entitas
-Rp3.173.619.*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing -Rp3.173.215.619 dan -Rp1.799.563.917.

*Ekuitas Akhir
Rp6.253.938.776.*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.253.938.776 dan Rp 6.018.198.657.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

*Program Prioritas
Nasional
Rp56.653.650.*

F.1 Pengungkapan Capaian Kinerja Prioritas Nasional

Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN) merupakan Program Prioritas Nasional. Realisasi belanja pada program Prioritas Nasional per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.653.650 terserap 99,35% dari total anggaran yang tersedia sejumlah Rp57.025.000. Realisasi volume keluaran per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 577 rekomendasi tercapai 100% dari target keluaran sebanyak 577 rekomendasi.

Tabel 5.1 Pengungkapan Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional

No	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
1	4798.UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	Rp57.025.000	Rp56.653.650	99,35%	577	577	100%

F.2 Pengungkapan Pejabat Pengelola Keuangan KPKNL Jayapura

Pada 31 Desember 2025 Pejabat Pengelola Keuangan pada tahun di Lingkup KPKNL Jayapura adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Khusnawan Sigit Susanto
Pejabat Pembuat Komitmen : Cliff Martino Joshua Coutrier
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Rinto Arizandi Saputro
Bendahara Pengeluaran : Fawwaz Wafda Mujahid

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (538129) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAYAPURA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 2:08 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	25,400,000	14,966,000	10,434,000	69.72
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	12,500,000	12,500,000	0	0.00
Persediaan	72,800,112	72,487,533	312,579	0.43
JUMLAH ASET LANCAR	110,700,112	99,953,533	10,746,579	10.75
ASET TETAP				
Tanah	2,564,512,000	2,564,512,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,726,765,550	3,841,904,123	(115,138,573)	(3.00)
Gedung dan Bangunan	2,520,226,000	2,520,226,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,000,000	2,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,641,670,126)	(2,987,382,320)	345,712,194	(11.57)
JUMLAH ASET TETAP	6,171,833,424	5,941,259,803	230,573,621	3.88
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	458,598,274	0	458,598,274	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(458,598,274)	0	(458,598,274)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	6,282,533,536	6,041,213,336	241,320,200	3.99
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	28,594,760	23,014,679	5,580,081	24.25
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28,594,760	23,014,679	5,580,081	24.25
JUMLAH KEWAJIBAN	28,594,760	23,014,679	5,580,081	24.25
EKUITAS				
Ekuitas	6,253,938,776	6,018,198,657	235,740,119	3.92
JUMLAH EKUITAS	6,253,938,776	6,018,198,657	235,740,119	3.92
JUMLAH EKUITAS	6,253,938,776	6,018,198,657	235,740,119	3.92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,282,533,536	6,041,213,336	241,320,200	3.99

Keterangan :
FINAL

Kota Jayapura, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHUSNAWAN SIGIT SUSANTO
NIP 197802242000011002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (538129) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAYAPURA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 2:07 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,859,479,134	4,880,525,205	978,953,929	20.058
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,859,479,134	4,880,525,205	978,953,929	20.058
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,859,479,134	4,880,525,205	978,953,929	20.058
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	65,642,201	97,531,142	(31,888,941)	(32.696)
Beban Barang dan Jasa	972,097,429	914,832,839	57,264,590	6.26
Beban Pemeliharaan	243,981,062	254,777,682	(10,796,620)	(4.238)
Beban Perjalanan Dinas	821,296,624	1,032,790,764	(211,494,140)	(20.478)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (538129) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAYAPURA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 2:07 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	407,559,080	396,671,985	10,887,095	2.745
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,510,576,396	2,696,604,412	(186,028,016)	(6.899)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	3,348,902,738	2,183,920,793	1,164,981,945	53.344
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	60,053,000	111,634,900	(51,581,900)	(46.206)
Pendapatan Pelepasan Aset	60,053,000	111,634,900	(51,581,900)	(46.206)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	60,053,000	111,634,900	(51,581,900)	(46.206)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3,408,955,738	2,295,555,693	1,113,400,045	48.502
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	3,408,955,738	2,295,555,693	1,113,400,045	48.502

Keterangan :
FINAL

Kota Jayapura, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHUSNAWAN SIGIT SUSANTO
NIP 197802242000011002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 538129

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 2:07 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	10,762,610,000	5,919,532,134	(4,843,077,866)	55	4,280,562,000	4,992,160,105	(711,598,105)	117
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,762,610,000	5,919,532,134	(4,843,077,866)	55	4,280,562,000	4,992,160,105	(711,598,105)	117
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	10,762,610,000	5,919,532,134	(4,843,077,866)	55	4,280,562,000	4,992,160,105	(711,598,105)	117
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,271,154,000	2,674,930,036	(1,596,223,964)	63	3,331,357,000	3,192,596,188	138,760,812	96
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,601,030,000	2,107,673,035	(493,356,965)	81	2,424,367,000	2,285,610,188	138,756,812	94
3. Belanja Modal	1,670,124,000	567,257,001	(1,102,866,999)	34	906,990,000	906,986,000	4,000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 538129

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 2:07 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,271,154,000	2,674,930,036	(1,596,223,964)	63	3,331,357,000	3,192,596,188	138,760,812	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kota Jayapura, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KHUSNAWAN SIGIT SUSANTO
NIP 197802242000011002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (538129) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAYAPURA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 2:07 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,018,198,657	5,522,206,881	495,991,776	8.98
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,408,955,738	2,295,555,693	1,113,400,045	48.5
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,173,215,619)	(1,799,563,917)	(1,373,651,702)	76.33
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	235,740,119	495,991,776	(260,251,657)	(52.47)
EKUITAS AKHIR	6,253,938,776	6,018,198,657	235,740,119	3.92

Keterangan :

FINAL

Kota Jayapura, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

KHUSNAWAN SIGIT SUSANTO

NIP 197802242000011002